



2.329 KASUS PMK MELANDA DIY

Pemkot Tingkatkan Pengawasan Penjualan Daging

YOGYA (KR) - Merebaknya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi di berbagai daerah turut menjadi kewaspadaan bagi Kota Yogya. Sebagai daerah perlintasan hewan ternak, peningkatan pengawasan penjualan daging menjadi atensi utama.

Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogya Imam Nurwahid, mengatakan pengawasan yang dilakukan untuk memastikan daging sapi yang dijual aman dan layak konsumsi bagi masyarakat. "Kami pengawasan rutin dengan tetap memperhatikan kasus-kasus PMK itu. Lebih meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan karena kalau sudah jadi daging tidak kelihatan," katanya, Kamis (16/1).

Pengawasan produk pangan seperti daging rutin dilakukan minimal sebanyak enam kali pengawasan. Produk daging yang masuk ke Kota Yogya harus membawa surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dan surat keterangan kesehatan daging dari daerah asal. Hasil pengawasan sejak awal Januari sejauh ini tidak ada temuan. Selama ini daging sapi dan kambing di pasar di kota kebanyakan dari Bantul dan Boyolali serta sebagian kecil dari Sleman dan Temanggung.

Sementara itu Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogya Sri

Panggarti, menyampaikan sampai saat ini belum ada temuan kasus PMK pada ternak sapi, kambing dan domba di Kota Yogya. Lalu lintas ternak dari luar kota baik untuk dipelihara maupun dipotong wajib memiliki SKKH. Termasuk penjualan sapi dari peternak disarankan untuk meminta SKKH untuk mencegah penularan PMK. "Hasil koordinasi kabupaten kota semakin kita dorong untuk tertib menggunakan SKKH. Kalau yang masuk Rumah Potong Hewan (RPH) pasti membawa SKKH. Kalau tidak, kita ada pemeriksaan ulang. RPH kami sejak dulu tidak menerima sapi yang sakit PMK," terangnya.

Menurutnya PMK bukan penyakit zoonosis yang menular ke manusia sehingga daging ternak bisa dikonsumsi. Namun hewan yang sakit pasti berpengaruh pada kualitas daging. Oleh sebab itu meskipun sakit PMK dan boleh dipotong dengan perlakuan khusus, disarankan daging untuk segera diolah di wilayah itu, serta tidak boleh diperdagangkan.

"Kami imbau masyarakat hati-hati

untuk membeli daging. Tidak hanya untuk PMK, tapi daging kondisi apapun. Jangan tergiur harga murah. Beli tempat yang memotong hewan di RPH. Secara fisik daging merah segar, tidak bau busuk serta lihat warna konsistensinya," imbuhnya.

Terpisah Kepala Bidang Keterse-diaan Pengawasan Dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogya Sri Riswanti, memaparkan pihaknya bersama instansi lain selalu melakukan pengawasan penjualan daging dan pangan lainnya. Terutama memastikan pedagang menaati aturan agar pangan di pasar aman. Pasar di Kota Yogya yang menjual daging sapi adalah Pasar Beringharjo, Sentul, Prawiro-taman, Pathuk, Kotagede, Kranggan, Serangan dan Demangan.

Pada Desember 2024 lalu jajaran Pemkot Yogya juga melakukan operasi yustisi pengawasan penjualan daging di pasar-pasar di Kota Yogya. Dalam operasi itu ditemukan lima penjual daging yang melanggar aturan dan standar yang berlaku karena tidak menunjukkan SKKH. Dua pelanggar dilakukan tipiring, satu pelanggar diberikan surat peringatan, dan dua lainnya diberikan pembinaan karena tidak terbukti menjual.

Sementara itu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) DIY pada bulan Januari telah menerima

11.000 dosis vaksin untuk sapi. "Saat ini keberadaan vaksin tersebut sangat penting untuk mencegah penyebaran kasus PMK yang semakin luas. Selain vaksinasi, DPKP DIY juga telah menerima bantuan obat-obatan dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) untuk diberikan kepada ternak yang sakit dan vitamin untuk ternak yang sehat," kata Kepala (DPKH) DIY, Syam Arjayanti, Kamis (16/1).

Syam mengungkapkan, saat ini sudah ada 2.329 kasus PMK di wilayah DIY. Dari jumlah tersebut, 2.090 kasus masih aktif, sementara 20 ekor ternak dinyatakan sembuh, 166 ekor mati, dan 53 ekor terpaksa dipotong. Sedangkan untuk vaksinasi, sampai saat ini baru 1.314 dosis vaksin yang diberikan. Jumlah vaksin itu masih sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan populasi ternak yang lebih besar.

DPKP DIY juga bekerjasama dengan Asosiasi Dokter Hewan dan tenaga medis lainnya untuk membantu mempercepat proses vaksinasi dan memastikan distribusi obat berjalan dengan lancar. Termasuk melibatkan stakeholder terkait untuk memperketat lalu lintas ternak. "Kami selalu menekankan setiap ternak yang keluar masuk wilayah DIY harus disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan memastikan ternak sudah divaksin," ungkapnya. **(Dhi/Ria)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanian dan Pangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005